



Pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia

The effect of local revenue effectiveness, local financial efficiency, degree of fiscal decentralization, and capital expenditure on the human development index

Odi Prabowo^{1*}, Darmawati², Nirwana³

^{1, 2, 3} Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran penting keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan manusia. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengambil sampel 13 kabupaten/kota periode 2020–2023. Analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan perangkat lunak EViews 12. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah, derajat desentralisasi fiskal, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM, sedangkan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian keuangan daerah dan pembangunan manusia serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia

Abstract

This study aims to analyze the impact of local revenue effectiveness, regional financial efficiency, fiscal decentralization, and capital expenditure on the Human Development Index (HDI) in Central Sulawesi Province. Motivated by the critical role of regional finance in improving quality of life through human development, this quantitative study uses a panel data regression approach, analyzing 13 regencies/cities from 2020 to 2023. Data were sourced from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance, processed using EViews 12. Results show that local revenue effectiveness, fiscal decentralization, and capital expenditure have no significant impact on HDI, while regional financial efficiency positively and significantly affects HDI. This study enriches academic discourse on regional finance and human development, offering relevant insights for local governments to design fiscal policies that enhance community well-being.

Keywords: Effectiveness of Local Revenue, Efficiency of Local Finance, Fiscal Decentralization, Capital Expenditure, Human Development Index

Histori Artikel:

Diterima 27 Juni 2025, Direvisi 26 Agustus 2025, Disetujui 28 Agustus 2025, Dipublikasi 26 September 2025.

***Penulis Korespondensi:**

odiprabowo.20.0202@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.776>

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dijalankan dengan harapan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak hanya secara ekonomi, namun juga sosial dan budaya. Namun, seiring dengan kompleksitas tantangan global, paradigma pembangunan terus mengalami pergeseran. Tidak cukup lagi hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indikator kemajuan suatu bangsa, karena pada kenyataannya, kemajuan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks tersebut, muncul kesadaran bahwa manusia harus menjadi pusat dari seluruh proses pembangunan. Pembangunan tidak hanya tentang membangun infrastruktur atau meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga tentang bagaimana memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup sehat, pendidikan, serta standar hidup yang layak. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pembangunan kini diukur melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan manusiawi.

Di Indonesia, IPM menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data IPM yang menunjukkan bagaimana perkembangan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Meski secara umum IPM Indonesia terus meningkat, masih terdapat ketimpangan antarwilayah yang cukup mencolok. Tahun 2023 Wilayah Kota Palu cenderung memiliki IPM 82,52 yang lebih tinggi dibanding wilayah Kab. Tojo Una-Una IPM 66,39 (Badan Pusat Statistik, 2025), mencerminkan adanya perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Pada situasi otonomi daerah, Pemda memiliki kewenangan lebih luas dalam mengalokasikan keuangannya untuk kesejahteraan (Hardana & Nasution, 2022).

Efektivitas PAD, yang diukur melalui rasio EPAD, mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal guna membiayai kebutuhan pembangunan (Fathah, 2017). PAD yang efektif akan mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, dan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Efisiensi keuangan daerah menggambarkan kemampuan, dalam hal ini pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara bijak, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan hasil maksimal. Pemda dituntut agar efisien dalam pengelolaan keuangan daerah (Iskandar & Subekan, 2014). Efisiensi ini penting agar penggunaan anggaran benar-benar menasar sektor-sektor yang langsung memberi dampak naiknya kualitas hidup.

Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan peran Pemda dapat mengelola atau mengalokasikan anggaran dengan mandiri keuangannya yang berdasar pada daerahnya (Rahma et al., 2022). Semakin tinggi desentralisasi fiskal, diharapkan semakin besar pula fleksibilitas daerah dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam upaya meningkatkan IPM. Namun demikian, kemandirian fiskal juga harus didukung oleh kapasitas kelembagaan dan tata kelola keuangan yang baik. Banyak daerah yang memiliki potensi pendapatan tinggi tetapi belum mampu mengalokasikannya secara tepat untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan desentralisasi fiskal (Hardiana, 2023).

Belanja modal juga merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah. Berbeda dengan belanja rutin, belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah (Tumbuan et al., 2023). Investasi dalam aset jangka panjang ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan IPM dalam jangka menengah hingga panjang. Sayangnya, dalam banyak kasus, alokasi belanja modal masih belum proporsional dan tidak selalu diarahkan pada sektor-sektor prioritas. Beberapa daerah masih fokus pada belanja yang bersifat administratif, sementara kebutuhan masyarakat dalam sektor pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi. Besarnya belanja modal, belum

tentu memberikan dampak maksimal pada pembangunan manusia tanpa perencanaan dan pengawasan yang memadai.

Berbagai instrumen fiskal seperti efektivitas pendapatan asli daerah (EPAD), efisiensi keuangan daerah (EKD), derajat desentralisasi fiskal (DDF), dan belanja modal (BM) diyakini berperan penting dalam menentukan kualitas pembangunan manusia. Namun demikian, studi-studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Seperti Penelitian oleh (Harliyani & Haryadi, 2016), menunjukkan EPAD tidak memiliki pengaruh pada IPM. Berbeda (Rahma et al., 2022), EPAD punya pengaruh kearah positif pada IPM. Penelitian oleh (Iskandar & Subekan, 2014) EKD tidak memiliki pengaruh pada kesejahteraan masyarakat (IPM). Penelitian oleh (Harliyani & Haryadi, 2016), menunjukkan DDF punya pengaruh kearah positif pada IPM. Berbeda (Mutihah, 2018), DDF tidak memiliki pengaruh pada IPM. Penelitian oleh (Tumbuan et al., 2023), menunjukkan BM punya pengaruh kearah positif pada IPM. Berbeda (Komariah et al., 2019), BM tidak punya pengaruh pada IPM.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus geografis yang spesifik, yakni pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2023, yang masih jarang diteliti secara mendalam dalam konteks pembangunan manusia dan keuangan daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan relevan terhadap realitas lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan adalah ikatan kerja *principal* dan *agent*. Teori keagenan pada konteks pemerintahan, menjelaskan hubungan rakyat sebagai prinsipal, serta pemerintah sebagai agen. Bertugas menjalankan roda pemerintahan dan mengelola sumber daya publik. Pemda sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran, serta sumber daya yang berasal dari publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dengan mengalokasikan anggaran secara efektif untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak maka tujuan pembangunan manusia dapat tercapai secara optimal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolok ukur untuk menilai capaian pembangunan manusia (Ulumi et al., 2024). Di Indonesia, BPS mempublikasikan data IPM secara rutin untuk mengukur kinerja pembangunan manusia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Nilai IPM yang tinggi mencerminkan keberhasilan suatu daerah dalam memberikan layanan dasar yang berkualitas serta merata kepada seluruh penduduknya dan begitu sebaliknya IPM rendah mengartikan akses layanan masih menjadi tantangan (Yulianti & Qomariah, 2025). Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan yang bersifat multidimensional, IPM memiliki posisi strategis dalam evaluasi kebijakan publik. Peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi (Dewi & Meydianawathi, 2025). Namun juga pada efektivitas pengelolaan anggaran dan kebijakan yang menysasar peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (EPAD)

Rasio EPAD mencerminkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan PAD yang telah ditetapkan (Wulandari et al., 2023). Semakin tinggi rasio EPAD, semakin menunjukkan bahwa daerah mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan lokal secara optimal. Ketika pengelolaan PAD dilakukan secara

optimal, pemerintah daerah memperoleh keleluasaan fiskal yang lebih tinggi untuk mendistribusikan anggaran ke sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur dasar.

Efisiensi Keuangan Daerah (EKD)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (EKD) merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan anggaran secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan perhitungan yang teliti terhadap jumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh seluruh pendapatan yang masuk, guna menilai tingkat efisiensi dari proses pemungutan pendapatan tersebut (Purwanti & Noviyanti, 2021). Dengan mengetahui perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh, pemerintah dapat mengevaluasi apakah mekanisme pengumpulan pendapatan telah berjalan secara efektif dan hemat sumber daya. Pemda yang mampu mengelola keuangan secara efisien akan lebih mampu menyediakan layanan publik yang berkualitas dan merata.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Rasio DDF mencerminkan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab fiskal telah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai DDF, semakin besar pula peran daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, yang menunjukkan kemampuan kemandirian fiskal atau desentralisasi (Wulandari et al., 2023). Ketika desentralisasi fiskal diterapkan secara optimal, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk menyusun program sesuai dengan karakteristik wilayah atau permasalahan masyarakat yang spesifik. Kewenangan dalam menetapkan skala prioritas belanja publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang secara langsung berperan dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Belanja Modal (BM)

Belanja modal merupakan bentuk pengeluaran Pemda yang dialokasikan untuk memperoleh aset seperti pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, serta fasilitas layanan kesehatan (Tumbuan et al., 2023). Penyaluran anggaran belanja modal secara tepat sasaran diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik sekaligus meningkatkan kualitasnya. Melalui investasi dalam bentuk aset tetap, pemerintah daerah dapat menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari website resmi BPS dan DJPK. Efektivitas PAD (EPAD), Efisiensi Keuangan Daerah (EKD), Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), dan Belanja Modal (BM) yaitu variabel independen penelitian. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipakai variabel dependen. Sampel penelitian, yaitu kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2020-2023 sebanyak 13. Teknik yang digunakan dalam analisis, yaitu analisis regresi data panel dengan bantuan EViews 12.

Rasio EPAD digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah dirancang dalam dokumen anggaran (Mahmudi, 2019). Rasio ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan local dan jenis penerimaan lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Apabila nilai rasio efektivitas semakin tinggi, hal ini menunjukkan bahwa daerah berhasil memanfaatkan potensi fiskalnya secara maksimal untuk mendukung pembiayaan pembangunan tanpa ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat. Dengan

demikian, rasio EPAD tidak hanya menggambarkan pencapaian angka target pendapatan, tetapi juga merefleksikan kualitas tata kelola fiskal dan kapasitas kelembagaan Pemda dalam kemandirian pengelolaan keuangan.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio EKD untuk menunjukkan perbandingan antara jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan, dengan total pendapatan yang berhasil diperoleh selama satu periode anggaran (Purwanti & Noviyanti, 2021). Rasio ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kemampuan manajerial pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien. Dengan ini, bisa diketahui biaya untuk menghasilkan setiap satu satuan pendapatan. Jika rasio ini menunjukkan nilai yang semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola anggarannya secara lebih efisien, karena dapat memperoleh pendapatan yang tinggi dengan pengeluaran yang relatif rendah.

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio DDF berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah, khususnya dalam hal kemampuan membiayai pengeluaran dari sumber pendapatan asli. Indikator ini menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap pendanaan eksternal, terutama dari pemerintah pusat. Ketika PAD mengalami peningkatan, maka kapasitas fiskal daerah pun ikut meningkat, memungkinkan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik secara mandiri, tanpa terlalu mengandalkan dana transfer pusat (Wulandari et al., 2023).

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi dalam Purwanti & Noviyanti (2021) rasio BM adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah dalam satu periode anggaran.. Belanja modal sendiri mencakup pengeluaran Pemda yang dipakai untuk mendapatkan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Rasio ini penting karena dapat mencerminkan arah kebijakan fiskal daerah, apakah lebih berorientasi pada belanja rutin yang bersifat konsumtif atau pada belanja produktif yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model

Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	89.250333	(12.35)	0.0000
Cross-section Chi-square	179.564358	12	0.0000

Sumber: Data olahan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji chow yang ada pada tabel 1 menunjukkan nilai Prob. 0,0000 yang mengartikan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model yang terpilih pada uji chow, yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

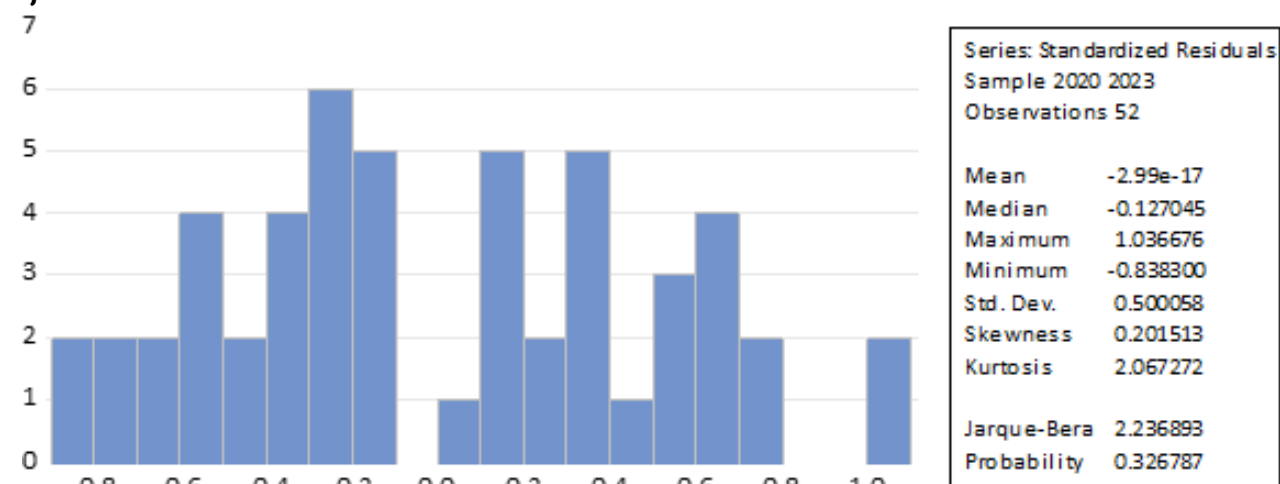
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.757324	4	0.0294

Sumber: Data olahan Eviews 12, 2025

Pada tabel 2 nilai Prob. sebesar 0,0294 yang mengartikan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model yang terpilih pada uji hausman, yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normlitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data olahan Eviews 12, 2025

Pengujian normalitas dengan memakai Jarque–Bera, dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya (Basuki, 2021). Hasil di gambar 1, menampilkan nilai Probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,326787 > 0,05. Bisa diambil kesimpulan bahwa data telah terdistribusi normal yang menandakan uji normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

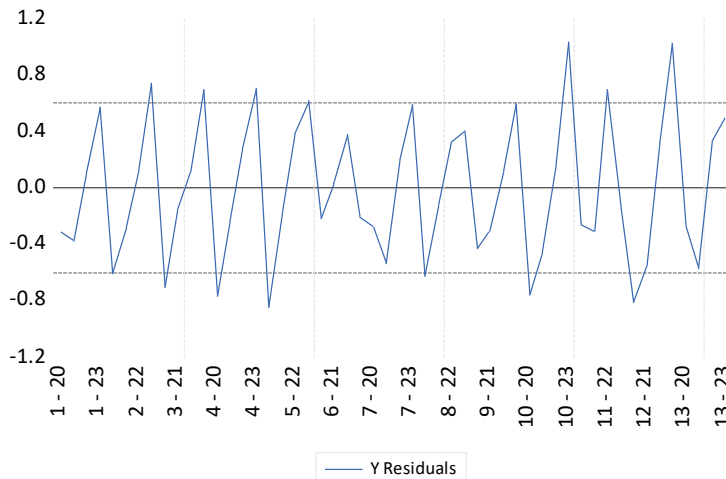
	X1 (EPAD)	X2 (EKD)	X3 (DDF)	X4 (BM)
X1 (EPAD)	1.000000	0.257497	0.273861	-0.070479
X2 (EKD)	0.257497	1.000000	-0.027010	-0.502062
X3 (DDF)	0.273861	-0.027010	1.000000	0.319659
X4 (BM)	-0.070479	-0.502062	0.319659	1.000000

Sumber: Data olahan Eviews 12, 2025

Hasil di tabel 3, menunjukkan Efektivitas PAD X1 dan Efisiensi Keuangan Daerah X2 (0.257497 < 0,85), Efektivitas PAD X1 dan Derajat Desentralisasi Fiskal X3 (0.273861 < 0,85),

Efektivitas PAD X1 dan Belanja Modal X4 (-0.070479 < 0,85), X2 Efisiensi Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal X3 (-0.027010 < 0,85), X2 Efisiensi Keuangan Daerah dan Belanja Modal X4 (-0.502062 < 0,85), Derajat Desentralisasi Fiskal X3 dan Belanja Modal X4 (0.319659 < 0,85). Oleh sebab itu, disimpulkan terbebas atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data olahan Eviews 12, 2025

Dilihat dari gambar 2, menunjukkan bahwa residual berada pada batas yang ditentukan yaitu 500 dan -500 (Napitupulu et al., 2021). Sehingga bisa diambil kesimpulan, tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	168.2512	Durbin-Watson stat	1.086596
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data olahan Eviews 12, 2025

Dilihat pada tabel 4 tidak terjadi autokorelasi, DW 1,086596 berada diantara -2 dan +2 (Aulia et al., 2024).

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 5. Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.42274	0.759732	88.74537	0.0000
X1 (EPAD)	0.002962	0.005935	0.499051	0.6209
X2 (EKD)	0.003799	0.001812	2.097013	0.0433
X3 (DDF)	0.093969	0.080983	1.160355	0.2538
X4 (BM)	0.009481	0.028697	0.330380	0.7431

Sumber: Data olahan Eviews 12, 2025

$$Y = 67,42274 + 0,002962 + 0,003799 + 0,093969 + 0,009481$$

Persamaan regresi data panel, bisa dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta 67,42274, menunjukkan bila EPAD, EKD, DDF, dan BM dianggakan konstan, maka IPM bernilai 67,42274.

2. Nilai koefisien EPAD 0,002962 korelasi positif, mengartikan tiap 1 kenaikan EPAD bisa menaikkan IPM 0,002962.
3. Nilai koefisien EKD 0,003799 korelasi positif, mengartikan tiap 1 kenaikan EKD bisa menaikkan IPM 0,003799.
4. Nilai koefisien DDF 0,093969 korelasi positif, mengartikan tiap 1 kenaikan DDF bisa menaikkan IPM 0,093969.
5. Nilai koefisien BM 0,009481 korelasi positif, Mengartikan tiap 1 kenaikan BM bisa menaikkan IPM 0,009481.

Hasil Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.42274	0.759732	88.74537	0.0000
X1 (EPAD)	0.002962	0.005935	0.499051	0.6209
X2 (EKD)	0.003799	0.001812	2.097013	0.0433
X3 (DDF)	0.093969	0.080983	1.160355	0.2538
X4 (BM)	0.009481	0.028697	0.330380	0.7431

Sumber: Data olahan Eviews 12, 2025

Hasil di Tabel 6, variabel EPAD (X1) mendapat nilai t 0,499051 < 2,010635, Prob. 0,6209 > 0,05 bisa diartikan EPAD tidak punya pengaruh pada IPM **H1 ditolak**. Variabel EKD (X2) mendapat nilai t 2,097013 > 2,010635, Prob. 0,0433 < 0,05 bisa diartikan EKD punya pengaruh positif signifikan pada IPM **H2 diterima**. Variabel DDF (X3) mendapat nilai t 1,16035 < 2,010635, Prob. 0,2538 > 0,05 bisa diartikan DDF tidak punya pengaruh pada IPM **H3 ditolak**. Variabel BM (X4) mendapat nilai t 0,330380 < 2,010635, Prob. 0,330380 > 0,05 bisa diartikan BM tidak punya pengaruh pada IPM **H4 ditolak**.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.987165
Adjusted R-squared	0.981298

Sumber: Data olahan Eviews 12, 2025

Pada tabel 7 menunjukkan nilai Adjusted R-squared, yakni 0,981298 atau 98,1298%. Nilai ini menjelaskan bahwa EPAD, EKD, DDF, dan BM dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia sebesar 98,1298%, dengan 1,8702% dipengaruhi variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh EPAD Terhadap IPM

Hasil penelitian pada tabel 6, menunjukkan EPAD tidak punya pengaruh pada IPM. Meskipun pemerintah daerah berhasil memenuhi target penerimaan PAD, namun pengelolaan dan alokasi dana yang diperoleh belum tentu diarahkan secara optimal untuk program-program yang mendukung pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas dalam hal pencapaian target pendapatan belum diiringi dengan efektivitas dalam pengelolaan pengeluaran publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, meskipun efektivitas PAD menjadi salah satu indikator kinerja fiskal daerah, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas PAD saja tidak cukup untuk mendorong peningkatan IPM. Diperlukan sinergi antara keberhasilan dalam

memperoleh pendapatan daerah dan strategi belanja yang berorientasi pada pembangunan manusia. Pemerintah daerah perlu memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta memastikan bahwa penerimaan PAD digunakan secara tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Hal ini sesuai dengan (Harliyani & Haryadi, 2016), menyatakan bahwa EPAD tidak punya pengaruh pada IPM.

Pengaruh EKD Terhadap IPM

Hasil penelitian pada tabel 6, menunjukkan EKD punya pengaruh positif signifikan pada IPM. Efisiensi keuangan daerah merefleksikan kesanggupan Pemda dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Ketika anggaran daerah digunakan secara efisien, maka belanja publik yang diarahkan pada sektor strategis, seperti pendidikan, infrastruktur sosial, kesehatan bisa berdampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat yang naik. Oleh karena itu, efisiensi keuangan memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan manusia. Namun, penting untuk dicatat bahwa efisiensi harus disertai transparansi dan akuntabilitas, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang jelas agar belanja publik tidak hanya hemat biaya, tetapi juga menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan berorientasi pada hasil, pembangunan manusia akan tumbuh secara lebih inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Hal ini berbeda dengan (Iskandar & Subekan, 2014), menyatakan bahwa EKD tidak punya pengaruh pada IPM.

Pengaruh DDF Terhadap IPM

Hasil penelitian pada tabel 6, menunjukkan DDF tidak punya pengaruh pada IPM. Hal ini menunjukkan bahwa, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pembangunan manusia. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih pada peningkatan kualitas SDA aparatur daerah, memperbaiki sistem akuntabilitas fiskal, dan memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan begitu, desentralisasi fiskal dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam meningkatkan IPM di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan (Mutih, 2018), menyatakan bahwa DDF tidak punya pengaruh pada IPM.

Pengaruh BM Terhadap IPM

Hasil penelitian pada tabel 6, menunjukkan BM tidak punya pengaruh pada IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk belanja modal belum tentu mampu meningkatkan dimensi-dimensi pembangunan manusia secara langsung, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pemanfaatan belanja modal atau belum meratanya pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, meskipun belanja modal meningkat, dampaknya terhadap IPM bisa saja tertunda atau tidak terasa jika tidak dibarengi perencanaan yang tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan (Komariah et al., 2019), BM tidak punya pengaruh pada IPM.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah (EPAD), efisiensi keuangan daerah (EKD), derajat desentralisasi fiskal (DDF), dan belanja modal (BM) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2023. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, diketahui

bahwa hanya EKD yang berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Sementara itu, EPAD, DDF, dan BM tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Temuan ini menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu ruang lingkup penelitian dibatasi pada wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah hingga tingkat provinsi lain atau secara nasional agar hasilnya lebih representatif. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti kemandirian daerah, ketergantungan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan saran bagi pemerintah daerah untuk lebih menekankan pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan. Upaya ini dapat dilakukan melalui perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan transparansi dalam penggunaan dana publik. Pemerintah daerah juga sebaiknya memastikan bahwa alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, efisiensi pengelolaan anggaran tidak hanya menjadi indikator keuangan, tetapi juga instrumen strategis dalam mendorong peningkatan IPM di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, U., Junaidi, H., PS, D. K., Meidatuzzahra, D., Nirmala, I. R., Sari, M. P., Syilfi, S., Rakanita, Y., Astuti, N. H., & Larasati, R. D. (2024). *Statistik Parametrik (Teori dan Aplikasi dengan SPSS)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEzIzI=/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia.html>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)* (Pertama). Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Dewi, Y. V., & Meydianawathi, L. G. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *Business and Investment Review*, 3(6).
- Fathah, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Hardana, A., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 52–61.
- Hardiana, D. R. (2023). Analisis Implementasi Desentralisasi Fiskal (Kebijakan Transfer Dana ke Daerah Pada Realisasi APBN 2021 Pasca Coronavirus Disase- 19). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 321–338.
- Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129–140.
- Iskandar, A., & Subekan, A. (2014). Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012)(Local Financial Performance and The Social Welfare on Districts and Municipals of South Sulawesi on 20. *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Vol. I/XII/2014- ISSN, 0852–6737*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Komariah, D., Yogiartoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*

Fakultas Ekonomi UNIAT, 4(S1), 523–532.

- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mutiha, A. H. (2018). The Effect of Financial Ratio to Human Development Index (Based on the Study in Districts and Cities of West Java). *KnE Social Sciences*, 848–861.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik, dan Analisis Data dengan SPSS-STATA-EVIEWS (Edisi 1)*. Medan: Madenatera.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2).
- Rahma, F., Yunarsi, Fatmala, W., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 55–61.
- Tumbuan, C. C. G., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 121–132.
- Ulumi, R. M., Abidin, Z., Salsabila, A., & Mariana, D. E. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2021. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 168–182.
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69.
- Yulianti, Y., & Qomariah, S. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Ilmu Pengetahuan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 5(1), 203–213.